

ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 - 2018

EDUCATION LEVEL IMPACT ANALYSIS, MINIMUM WAGE AND UNEMPLOYMENT RATE ON INCOME INEQUALITY IN SPECIAL TERRITORY OF JOGYAKARTA, 2008-2018

¹⁾ Istikharoh, ²⁾ Whinarko Juli Prijanto, ³⁾ Rian Destiningsih
^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia
Kharoh21@gmail.com

Abstrak

Ketimpangan pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2018 berada pada urutan pertama di Pulau Jawa dengan tingkat pengeluaran yang tidak merata. Tingkat pengeluaran di D.I Yogyakarta tidak merata disebabkan karena penduduknya memiliki pola konsumsi yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada pengaruh secara parsial antara tingkat pendidikan, upah minimum dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta tahun 2008-2018 dan pengaruh secara simultan antara variabel tingkat pendidikan, upah minimum dan tingkat pengangguran di D.I Yogyakarta tahun 2008 – 2018. Dalam penelitian ini data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel dengan pendekatan *common effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan; (2) upah minimum berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan; (3) tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan (4) tingkat pendidikan, upah minimum dan tingkat pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta tahun 2008-2018.

Kata Kunci : Ketimpangan, Pendidikan, Upah Minimum, Pengangguran

Abstract

Income inequality in The Special Region of Yogyakarta in 2008-2018 was ranked first in Java Island with an uneven level of expenditure. The level of expenditure in D.I Yogyakarta is uneven because the population has different consumption patterns. This study aims to analyze whether there is a partial influence between education level, minimum wage and unemployment rate on income inequality in D.I Yogyakarta in 2008-2018 and the simultaneous influence between education variables, minimum wage and unemployment rate in D.I Yogyakarta in 2008 - 2018. In this study, the data used was obtained from the Central Statistics Agency and the Department of Manpower and Transmigration. The analysis used in this study is the regression of panel data with a common effect model approach. The results showed that (1) the level of education has a significant effect on income inequality; (2) the minimum wage has a significant effect on income inequality; (3) The unemployment rate has no significant effect on income inequality and (4) the level of education, minimum wage and unemployment rate simultaneously have a significant effect on income inequality in D.I Yogyakarta in 2008-2018.

Keywords: Inequality, Education, Minimum Wage, Unemployment

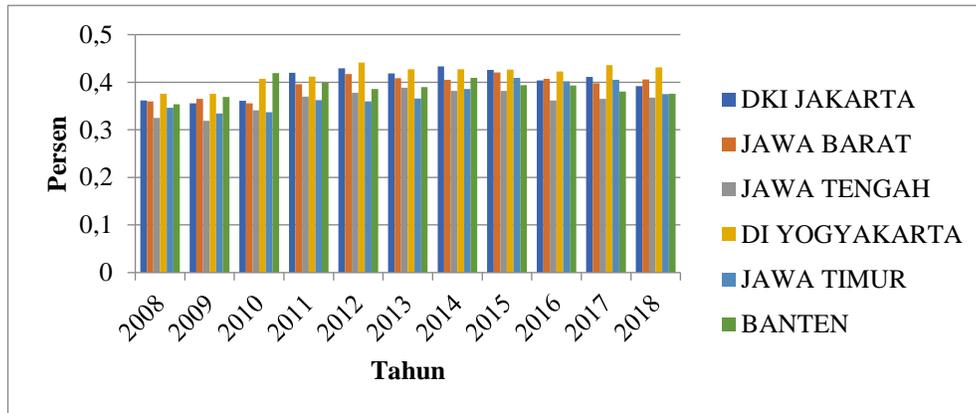
PENDAHULUAN

Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan juga pusat perekonomian yang ada di Indonesia, yang terdiri dari enam Provinsi diantaranya Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I Yogyakarta. Kegiatan perekonomian yang ada di Pulau Jawa sangat tinggi yang dapat dilihat dari besarnya kontribusi yang diberikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga Pulau Jawa menjadi penyumbang PDRB terbesar terhadap PDB nasional, besarnya PDRB yang disumbangkan tersebut masih menyisakan permasalahan perekonomian pada daerahnya sendiri berupa ketidakmerataan pendapatan yang ditunjukkan oleh besarnya nilai PDRB perkapita. Menurut Badan Pusat Statistik (2018) PDRB perkapita di Pulau Jawa yang paling besar yaitu pada Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 165.863,31, kemudian Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 39.587,92, Provinsi Banten sebesar Rp. 34.191,75, Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 29.161,39, Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 27.290,82, Provinsi D.I Yogyakarta sebesar Rp. 25.776,98. Hal tersebut mengindikasikan masih adanya ketimpangan pendapatan pada setiap daerah di Pulau Jawa.

Ketimpangan pendapatan merupakan perbandingan pendapatan yang relatif antara warga negara berpendapatan tinggi dengan rendah. Permasalahan ketimpangan pendapatan ini terjadipada semua negara (negara maju dan negara berkembang (Dewi dll, 2019 : 282)

Ketimpangan pendapatan diartikan sebagai distribusi yang tidak proporsional pada pendapatan nasional total diberbagai rumah tangga suatu negara. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan merupakan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat berbeda-beda yang berakibat pada perbandingan pendapatan yang cukup besar antara golongan kaya dan golongan miskin. Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan melihat besarnya nilai indeks gini. Indeks gini diartikan sebagai ukuran ketimpangan pendapatan yang nilainya 0 (terjadi pemerataan sempurna) sampai 1 (terjadi ketimpangan sempurna) (Todaro dan Smith, 2011: 254). Ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa masih terjadi dan terdapat perbedaan yang cukup tinggi pada setiap daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 1. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa indeks gini di Pulau Jawa mengalami fluktuasi pada setiap daerah. Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan paling tertinggi yaitu Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tengah.
ketimpangan terendah yaitu Provinsi Jawa

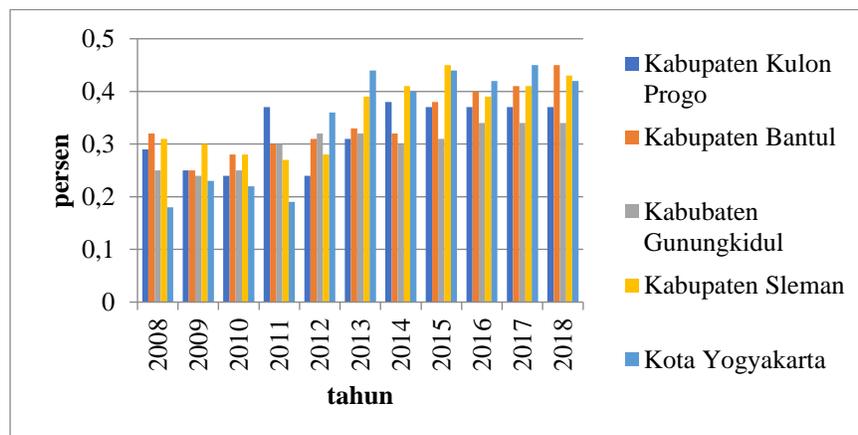


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Gambar 1. Perbandingan Indeks Gini Menurut Provinsi Di Pulau Jawa Tahun Tahun 2008 - 2018

Provinsi D.I Yogyakarta memiliki ketimpangan tertinggi di Pulau Jawa pada tahun 2008-2018. Menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Sairi Hasbullah (2019) menjelaskan bahwa tingginya ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta tersebut karena penduduknya memiliki pola konsumsi yang unik. Rumah tangga miskin di Provinsi D.I Yogyakarta cenderung menghemat pengeluarannya. Sedangkan

untuk pendatang dan kelas menengah keatas pengeluarannya hampir setara dengan provinsi yang lainnya dan mengungguli pengeluaran rumah tangga. Tingginya tingkat ketimpangan di D.I Yogyakarta mengindikasikan bahwa pemerintah belum berhasil dalam menjaga pemerataan pendapatan masyarakat di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi D.I Yogyakarta.

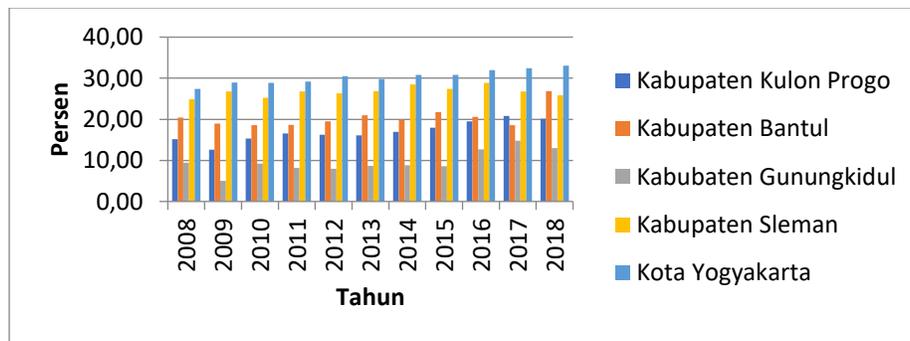


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Gambar 2. Indeks Gini Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 -2018

Pada gambar 2 menunjukkan kondisi ketimpangan pendapatan Di D.I Yogyakarta pada tahun 2008 -2018 yang dilihat dari indeks gini berada pada kategori ketimpangan pendapatan sedang. Daerah yang memiliki nilai rata-rata ketimpangan paling tinggi yaitu pada Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, dan untuk nilai rata-rata ketimpangan terendah yaitu pada Kabupaten Gunungkidul.

Ketimpangan pendapatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan dijadikan ukuran yang penting dalam menentukan pendapatan (Kuncoro, 2000 : 124). Sehingga pendidikan menjadi ukuran dalam menentukan tingkat upah yang berkontribusi cukup besar terhadap distribusi pendapatan (Nadya dan Syafri, 2019: 41).



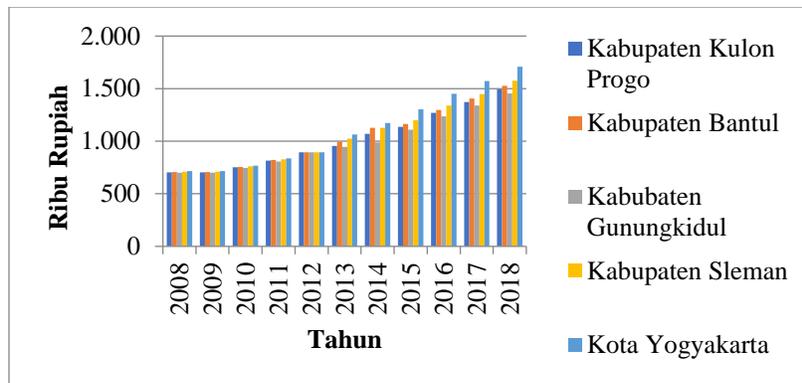
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Gambar 3. Tingkat Pendidikan Kabupaten/Kota Di D.I Yogyakarta Tahun 2008 -2018

Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan menurut Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta dari tahun 2008 – 2018 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pendidikan dengan pendekatan pendidikan tinggi ditamatkan tingkat SMA keatas yang memiliki rata-rata paling tinggi yaitu di Kota Yogyakarta, sedangkan tamatan SMA keatas yang rendah yaitu Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Gunungkidul memiliki rata-rata tingkat pendidikan terendah di Provinsi D.I

Yogyakarta disebabkan karena desakan faktor ekonomi dan faktor lingkungan sosial.

Selain tingkat pendidikan, Upah Minimum juga mempunyai peranan penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi. Menurut Sumarsono (2009: 181) Upah diartikan sebagai penerimaan imbalan balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan dan sistem pembayarannya sesuai dengan kesepakatan awal atau sesuai dengan peraturann perundang-undangan yang berlaku.

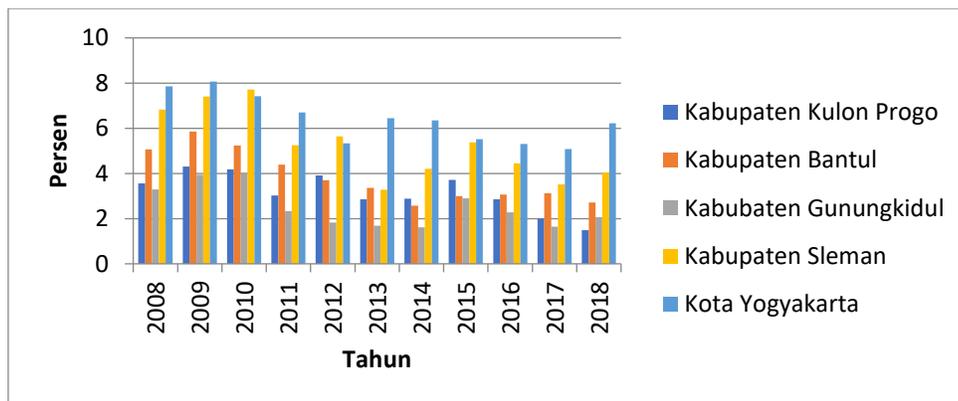


Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2019

Gambar 4. Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta tahun 2008 – 2018

Berdasarkan grafik 1.4 dapat dilihat bahwa upah minimum regional Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta tahun 2008 – 2018 menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Upah minimum regional yang paling tinggi yaitu pada Kota Yogyakarta dan terendah pada Kabupaten Gunungkidul. Dengan adanya perbedaan tingkat upah minimum Kabupaten/Kota di Provinsi D. I Yogyakarta tersebut mengindikasikan upah di setiap daerah masih belum merata.

Disamping tingkat pendidikan dan upah minimum, ketimpangan pendapatan juga dapat disebabkan oleh tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran dijadikan sebagai indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggi tingkat pengangguran menandakan bahwa kesejahteraan masyarakatnya masih rendah, dan semakin rendah tingkat pengangguran menandakan kesejahteraan masyarakatnya sudah tinggi (Sjafrizal, 2014:176).



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Gambar 5. Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota D.I Yogyakarta Tahun 2008 - 2018

Grafik 1.5 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran Di D.I Yogyakarta tahun 2008 -2018 rata-rata mengalami fluktuasi disetiap tahunnya. Rata-rata tingkat pengangguran tertinggi di tahun 2008 -2018 yaitu di Kota Yogyakarta dan terendah di Kabupaten Gunungkidul. Tingkat Pengangguran Kota Yogyakarta tinggi disebabkan karena sektor formal di Kota tersebut lebih banyak dimana pada sektor tersebut sulit untuk dimasuki para angkatan kerja yang menggunakan keahlian atau syarat-syarat tertentu dibandingkan dengan sektor informal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis ketimpangan pendapatan dengan judul “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2018”.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan metode deskriptif pendekatan kuantitatif dan menggunakan metode analisis regresi data panel.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian diantaranya Variabel Dependen (Y) merupakan Ketimpangan pendapatan. Sedangkan variabel independen (X) diantaranya Tingkat Pendidikan (X1), Upah Minimum (X2) dan Tingkat Pengangguran (X3).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka. Sebelum dilakukan analisis, data berupa *time serries* dan *cross section* Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta tersebut dikumpulkan yang kemudian dicatat, dijadikan satu dalam tabel sesuai dengan pengelompokannya yaitu indeks gini, penduduk menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMA keatas, upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Setelah data tersebut dikelompokkan kemudia dapat dilakukan analisa data panel.

Teknik Analisis Data

Uji Kesesuaian Model

Sebelum menentukan model estimasi yang terbaik yang akan diguakan dalam peneitian ini. Maka perlu dilakukan uji kesesuaian model dengan cara *Chow Test*, *Hausmant Test* dan *Lagrange Multiplier Test*.

Model Regresi Data Panel

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel. Menurut Widarjono (2005: 253-254) regresi data panel merupakan penggabungan data *anataracross section* dan *time serries*. Model regresi data panel dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e$$

Keterangan :

- Y = Ketimpangan Pendapatan
 α = Konstanta
 X1 = Tingkat Pendidikan
 X2 = Upah Minimum
 X3 = Tingkat Pengangguran
 $\beta(1,2,3)$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independent
 t = Waktu
 i = Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta
 e = Error term

Uji Statistik

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R²*. Dimana menurut Kuncoro (2004: 84-85) *Adjusted R²* ini digunakan untuk mengevaluasi model regresi yang terbaik. *Adjusted R²* dihitung dari :

$$AdjustedR^2 = 1 - (n - 1) \left[\frac{S^2}{TSS} \right] = 1 - (1 - R^2) \left[\frac{n-1}{n-k} \right]$$

Untuk $k > 1$ dan *Adjusted R²* < R^2 , apabila jumlah variabel independent

ditambah maka *Adjusted R²* naik dengan jumlah kenaikan kurang dari R^2 . *Adjusted R²* dapat bernilai negatif kendati R^2 selalu positif. Apabila *Adjusted R²* bernilai negatif maka nilainya dianggap nol. Secara umum, bila tambahan variabel independent merupakan prediktor yang baik, maka akan menyebabkan nilai variasi naik, dan pada gilirannya *Adjusted R²* meningkat begitupula sebaliknya.

Uji t

Menurut Kuncoro (2004: 81-82) Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Untuk melakukan pengujian tersebut dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{b}{Sb}$$

dimana b = variabel bebas dan Sb = standart deviasi (1%, 5% dan 10%).

Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dan Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Uji F

Menurut Kuncoro (2004: 82-83) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara *bersama-sama* terhadap

variabel terikat. Untuk menguji hipotesis tersebut maka digunakan statistik F. Nilai statistik F dihitung dari formula sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R^2 = koefisien korelasi berganda

n = Jumlah tahun

k = jumlah variabel

Kesimpulan dalam uji F (uji simultan) yaitu Apabila $H_{hitung} \leq F$ tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya bahwa tidak ada pengaruh secara bersama-sama dari variabel independent (X1, X2, X3) terhadap variabel dependen (Y). Apabila $F_{hitung} \geq F$ -tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa ada pengaruh secara bersama-sama dari variabel independen (X1, X2, X3) terhadap variabel dependen (Y).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Terbaik

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel. Terdapat beberapa metode regresi data panel yaitu pendekatan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Dalam pengolahan

data regresi data panel yang tepat harus melalui beberapa tahap pengujian diantaranya

1. Uji Chow

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.606900	(4,47)	0.6596
Cross-section Chi-square	2.769877	4	0.5970

Sumber : Data Diolah dengan Eviws 10, 2020

Pada tabel 1 merupakan hasil dari Uji Chow, yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section Chi-square* yang dihasilkan adalah 0.5970. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih dari tingkat signifikansi yaitu 5% (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Common Effect* lebih tepat digunakan daripada model *Fixed Effect*.

2. Uji Hausman

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman

Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.840343	3	0.6062

Sumber : Data Diolah dengan Eviws 10, 2020

Pada tabel 2 merupakan hasil dari Uji Hausman, yang menunjukkan bahwa

nilai probabilitas *cross-section random* sebesar 0.6062. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih dari tingkat signifikansi yaitu 5% (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Random Effect* lebih tepat digunakan jika dibandingkan dengan *Fixed Effect*.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Hasil pada Uji Hausman menunjukkan bahwa model terbaik yaitu *Random Effectmodel*. Oleh karena itu, dilanjutkan pada uji pemilihan model yang ketiga yaitu *Uji Lgrange Multiplier* (LM).

Tabel 3. Hasil Uji Lagrangen Multiplier
Bruch and Pagan Lagrange Multiplier Test

Chi ² (1)	=	0.961614
Prob<Chi ²	=	0.3268

Sumber : Data Diolah Dengan Eviws, 2020

Hasil Uji *Lagrange Multiplier* (LM) pada tabel 4.10 dapat dilihat nilai probabilitas>Chi Square dengan metode Brusch-Pagan yaitu 0.3268. hal tersebut menunjukkan bahwa probabilitas-Chi Square lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 5% (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Common Effect* lebih baik jika dibandingkan dengan model *Random Effect*.

Model Regresi Data Panel

Hasil Model regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

Common Effect Model (CEM). Persamaan model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = -1.737035 + 0.003918X_1 + 0.340122X_2 - 0.012619X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Ketimpangan Pendapatan

X1 = Tingkat Pendidikan

X2 = Upah Minimum

X3 = Tingkat Pengangguran

e = eror

Uji Statistik

Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Kuncoro (2004 84 - 85) Nilai Koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai *Adjusted R²* bukan R Square dari model regresi karena R Square bias terhadap jumlah variabel dependent yang dimasukkan ke dalam model, sedangkan *Ajusted R square* dapat naik turun jika suatu variabel independent ditambahkan dalam model.

Tabel 4. Hasil Koefisien Determinasi (Uji R²)

Sumber Variasi	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Regression
Regresi	0.703263	0.685808	0.040077

Sumber : Data Diolah dengan Eviws 10, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan dengan regresi data panel terlihat nilai *Adjusted R square* dengan nilai sebesar 0.686 atau 68,6% yang memiliki arti bahwa tingkat pendidikan, upah minimum dan

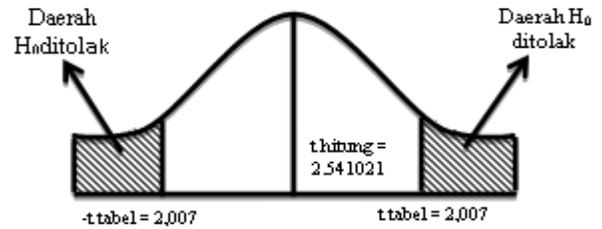
tingkat pengangguran mampu memberikan penjelasan tentang ketimpangan pendapatan. Sedangkan sisanya sebanyak 100 % - 68,6% atau sebesar 31,4% dijelaskan oleh variabel lain yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan di luar model regresi.

Uji t

Uji t (uji parsial) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Ketimpangan Pendapatan (Y).

1) Pengujian tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan

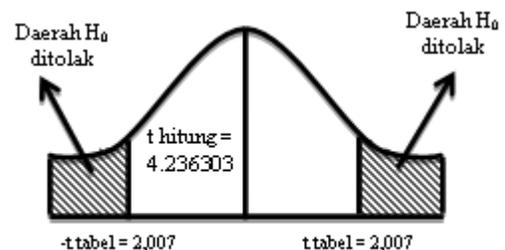
Berdasarkan analisis data pengujian tingkat pendidikan dengan $\alpha=5\% / 2$ (uji 2 sisi), $df = 55 - 3 = 52$, nilai t tabel = 2,007 sedangkan nilai t hitung = 2.541021. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $2.541021 > 2,007$, artinya bahwa H_0 ditolak dan H_a . Nilai probabilitas uji t yaitu sebesar 0.0141 lebih kecil dari nilai taraf signifikansi 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (Tingkat Pendidikan) menunjukkan ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y (Ketimpangan Pendapatan) di D.I Yogyakarta. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 6. Hasil uji t

2) Pengujian upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan

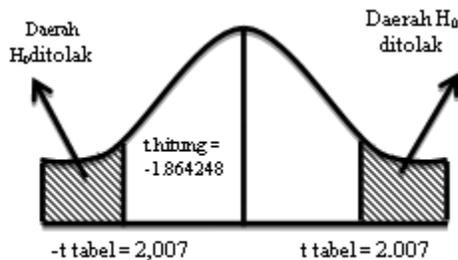
Berdasarkan analisis data pengujian upah minimum dengan $\alpha=5\% / 2$ (uji 2 sisi), $df = 55-3 = 52$, nilai t tabel = 2,007 sedangkan nilai t hitung = 4.236303. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $4.236303 > 2,007$, artinya bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai probabilitas sebesar 0.0001 menunjukkan bahwa lebih kecil dari nilai taraf signifikansi 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 (Upah Minimum) menunjukkan ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y (Ketimpangan Pendapatan) di D.I Yogyakarta. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini



Gambar 7. Hasil uji t

3) Pengujian tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan

Berdasarkan analisis data pengujian tingkat pengangguran dengan $\alpha=5\% / 2$ (uji 2 sisi), $df = 55-3 = 52$, nilai t tabel = 2,007 sedangkan nilai t hitung = 0.0680. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $-1.864248 < 2,007$, artinya bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Nilai probabilitas sebesar 0.0680 menunjukkan bahwa lebih besar dari nilai taraf signifikansi 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 (Tingkat Pengangguran) menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y (Ketimpangan Pendapatan) di D.I Yogyakarta. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 8. Hasil uji t

Uji F

Pengujian simultan (Uji F) dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.

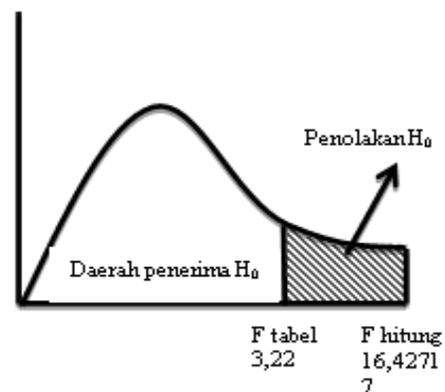
Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai F-hitung dan F-tabel.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F)

F-Statistik	40.28973	Durbin-Waston stat	1.334834
Prob(F-Statistik)	0.000000		

Sumber : Data Diolah dengan Eviws, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai F-tabel ($df_1= k-1$ dan $df_2= n-k$) sehingga ($df_1=2$, $df_2=52$) dengan menggunakan $\alpha=5\%$, maka diperoleh F-tabel sebesar 3,15. F-hitung pada pengujian ini yaitu 40.28973. Dengan begitu didapatkan hasil F-hitung lebih besar dari F-tabel , yaitu $40.28973 > 3,15$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.



Gambar 9. Hasil Uji

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di D.I Yogyakarta Tahun 2008 -2018

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesisi yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta. Artinya apabila terjadi kenaikan tingkat pendidikan sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan pada ketimpangan pendapatan.

Pendidikan tertinggi ditamatkan SMA keatas yang paling banyak yaitu Kota Yogyakarta. Tingginya pendidikan yang ditamatkan tersebut di ikuti dengan ketimpangan yang tinggi pula di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan penduduk Kota Yogyakarta lulusan SMA dan Perguruan Tinggi masih ada yang menjadi pengangguran. Pengangguran tersebut disebabkan karena para pencari kerja tersebut memilih untuk menunggu mendapatkan pekerjaan yang sesuai keahlian dan keinginannya. Dengan adanya tamatan SMA dan PT yang masih menganggur menyebabkan mereka tidak memiliki pendapatan sehingga ketimpangan pendapatan meningkat. Sehingga kebijakan dari pemerintah untuk mengurangi

ketimpangan pendapatan yaitu dengan mengembangkan balai latihan kerja (BLK) dan menjalin mitra kerja dengan pelaku usaha untuk meningkatkan keterampilan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadya dan Syafri (2019) yang menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di D.I Yogyakarta Tahun 2008 -2018

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesisi yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta. Artinya apabila terjadi kenaikan upah minimum sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan pada ketimpangan pendapatan.

Selama kurun waktu 2008-2018 upah minimum selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya pada daerah Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta. Upah minimum meningkat akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, karena upah yang diterima setiap daerah Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta tersebut masih berbeda-beda. Dengan adanya

perbedaan pendapatan di pada setiap daerah di D.I Yogyakarta yang berakibat pada ketidakmerataan pendapatan sehingga berdampak pada semakin meningkatnya ketimpangan pendapatan. Dengan begitu perlunya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan upah minimum yang masih rendah dan disamakan dengan daerah yang memiliki upah minimum yang tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sungkar dkk (2015) yang menyatakan bahwa Upah Minimum memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di D.I Yogyakarta Tahun 2008 -2018

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta. Artinya apabila terjadi kenaikan tingkat pengangguran sebesar 1% maka tidak akan berpengaruh pada penurunan ketimpangan pendapatan.

Dalam penelitian ini tingkat pengangguran yang dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan

tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta tahun 2008-2018. Hal tersebut disebabkan karena tingkat pengangguran di D.I Yogyakarta mengalami penurunan. Penurunan tingkat pengangguran tersebut disebabkan karena sektor informal di D. I Yogyakarta banyak menyerap tenaga kerja. Dimana sektor yang banyak menyerap tenaga kerja tersebut diantaranya sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian dan sektor jasa. Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap tersebut menjadikan tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap naik turunnya ketimpangan pendapatan. Selain itu juga disebabkan karena adanya kebijakan dari pemerintah berupa bantuan sosial untuk dapat meringankan beban masyarakat untuk dapat memenuhi kehidupannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hindun dkk (2019) menyatakan bahwa tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Antara Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan di D.I Yogyakarta Tahun 2008 -2018

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan, upah minimum dan tingkat pengangguran ada pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta secara bersama-sama. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel, yaitu sebesar $16,42717 > 3,22$ yang berarti secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan dari tingkat pendidikan, upah minimum dan tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Hindun dkk (2019) yang menyatakan bahwa pendidikan, pengangguran dan kemiskinan secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Disamping itu dalam penelitian Anshari dkk (2018) juga menyatakan bahwa pendidikan, upah minimum dan belanja modal berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh Provinsi di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis pengaruh pendidikan, upah minimum dan tingkat pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2018 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Tingkat Pendidikan (X1) hipotesis menyatakan bahwa H_0 ditolak yang berarti ada pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2018. Hal tersebut dikarenakan penduduk Kota Yogyakarta lulusan SMA dan Perguruan Tinggi masih ada yang menjadi pengangguran. Pengangguran tersebut disebabkan karena para pencari kerja tersebut memilih untuk menunggu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan keinginannya.
2. Variabel Upah minimum (X2) hipotesis menyatakan bahwa H_0 ditolak yang berarti ada pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2018. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pendapatan di pada setiap daerah di D.I Yogyakarta yang berakibat pada ketidakmerataan pendapatan sehingga berdampak pada semakin meningkatnya ketimpangan pendapatan.
3. Variabel Tingkat pengangguran (X3) hipotesis H_0 diterima yang berarti tidak ada pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2018. Hal

tersebut disebabkan karena tingkat pengangguran di D.I Yogyakarta mengalami penurunan. Penurunan tingkat pengangguran tersebut disebabkan karena sektor informal di D. I Yogyakarta banyak menyerap tenaga kerja.

4. Pendidikan, upah minimum dan tingkat pengangguran secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2018.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya usaha dari pemerintah daerah Provinsi D.I Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk daerah-daerah yang masih kurang terjangkau pendidikan pada Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta dapat merata, dengan adanya pemerataan pendidikan maka dapat meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan.
2. Perlunya tinjauan dari pemerintah untuk memperhatikan besaran upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang diterima masyarakat Provinsi D.I Yogyakarta dengan melakukan upaya pemerataan upah minimum di setiap daerah

Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta untuk menurunkan ketimpangan pendapatan.

3. Perlunya perhatian dari pemerintah daerah terkait dengan kesempatan kerja sehingga dapat semakin menurunkan tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan.
4. Ketimpangan pendapatan di D.I Yogyakarta termasuk pada kategori ketimpangan sedang, sehingga perlunya tindak lanjut dari pemerintah terkait dengan kebijakan ekonomi maupun non ekonomi agar ketimpangan pendapatan dapat turun dan dapat terjadi pemerataan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Muhammad *et al.* 2018. Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *EcoGen*. Volume 1, Nomer 3, Hlm. 249-502
- Arif, Muhammad dan Rossy Agustin Wicaksani. 2017. Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *The 6th University Research Colloquium Universitas Muhammadiyah Magelang*. Hlm. 323-328.
- Damodar N. Gujarati and Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Selemba Empat

- Fatsabit, Muhammad Ibnu dan Husna Leila Yusran. 2019. Pengaruh Keterbukaan Ekonomi, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Media Ekonomi*. Vol. 27 No. 1, Hlm. 71-84
- Fithrian, Masri *et al.* 2015. Analisis Pengaruh Agregat Demand dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendaparan di Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 3 No. 3, Hlm. 23-32
- Halim, Muh Abdul. 2018. *Teori Ekonomi Makro Edisi 3*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Hartini, ermatry. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2012-2015. *The International Journal Of Applied Business Tijab*. Volume 3 Nomer 1, Hlm. 16-23.
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Cetakan Kedua. Yogyakarta. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi Unuk Bisnis dan Ekonomi* Edisi Kedua. Yogyakarta. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (*Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*). Yogyakarta. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Kusuma, Dewi Septiani Dwi *et al.* 2019.. Analisis Pengaruh produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2018. *Directory Journal Of Economic*. Volume 1 Nomor 3 Hlm. 282-293.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makroekonomi edisi keenam*. Jakarta. Erlangga.
- Nadya, Aufa dan Syafri. 2019. Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonommi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia. *Media Ekonomi*. Vol. 27 No. 1, Hlm. 37-52
- Park, Kang H. 2017. Education, Globalization, and Income Inequality In Asia. *Cornell University ILR School*. No. 732, Hlm. 1-20.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomer 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.
- Rofiuddin, Muhammad dan Firmansyah. 2018. Income Inequality In Indonesia: Panel Data of 34 Provinces 2014-2016. *E3S Web Of Conferences*. 73, 10003 (2018) Hlm. 1-3
- Rosa, Yenni Del dan Ingra Sovita. 2016. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa. *Menara Ekonomi*. Volume II No. 4, Hlm. 41-52.

- Saputri, Rose Gita Cahya. 2017. Pengaruh Proddduktivitas Sektoral Ddan Laju PDRB Terhadap Tinngkat Ketimpangan Pendapatan Di Jawa Tengah Pada Tahun 2006-2015. *JurnalRiset Economi Pembangunan*. Volume 2 Nomer 2 Hlm 104-112.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung. Alfabeta
- Sungkar, Sari Nurmalisa *et al.* 2015. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 3, No. 2, Hlm. 40-53
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kesembilan*. Jakarta. Erlangga.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*. Jakarta. Erlangga.
- Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Ekonisia
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta. Ekonisia
- Wulandari, Istiqomah Septiani. 2016. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Magelang Tahun 2004-2013. *Riset Economi Pembangunan*. Volume 1 Nomer 1
- Zulkifli. 2016. Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Kontribusi Sektor Industri Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan. *ECCES Economics, Social, and Development Studies*. Vol. 3 No. 2, Hlm. 90-106.